BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Orientasi kemajuan suatu negara sering kali dipahami secara terbatas pada aspek ekonomi semata. Umumnya, standar keberhasilan pembangunan diukur melalui indikator-indikator ekonomi makro, seperti pengumpulan modal, laju pertumbuhan ekonomi, dan tingkat pendapatan per kapita. Dalam praktiknya, terdapat tantangan besar di mana strategi untuk memacu pertumbuhan dan upaya pemerataan kesejahteraan sering kali sulit berjalan beriringan. Saat fokus utama beralih pada ekspansi ekonomi, kesejahteraan sosial bagi masyarakat cenderung terabaikan, begitu pun sebaliknya (Kurniawan et al., 2023). Sayangnya, kebijakan yang dipilih sering kali tertuju pada pencapaian ekonomi semata. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa hasil pembangunan akan terdistribusi dengan sendirinya tanpa memerlukan intervensi khusus untuk pemerataan di kalangan masyarakat.

Pencapaian pembangunan yang hanya diukur melalui parameter ekonomi konvesional dinilai belum mampu mencerminkan kualitas hidup masyarakat yang sebenarnya. Angka-angka agregat dalam *Product Domestic Bruto*/Produk Nasional Bruto (PDB/PNB) tidak cukup kuat untuk menjelaskan kondisi sosial dan kesejahteraan mental (*state of mind*) yang dirasakan masyarakat (Indarti, 2017). Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa pertumbuhan ekonomi yang pesat sering kali menciptakan paradoks, di mana disparitas ekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin semakin lebar (Regina et al., 2020).

Fenomena di berbagai negara menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak serta-merta menghapus permasalahan sosial, seperti pengangguran, kemiskinan, dan kesenjangan. Dalam hal ini negara India menjadi contoh nyata, meskipun mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 6 – 8% per tahun, India masih bergelut dengan angka pengangguran yang tinggi. Hal ini membuktikan bahwa lonjakan ekonomi yang terjadi belum mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sehingga keberhasilan pembangunan belum terdistribusi secara menyeluruh (Takale & Jagdish, 2025).

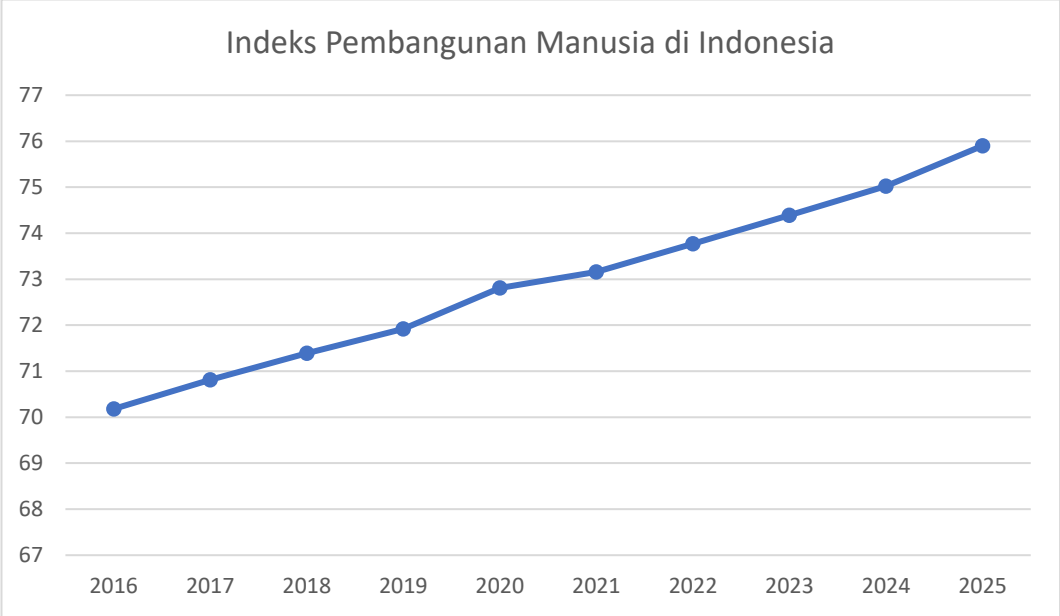
Menanggapi kondisi tersebut, banyak negara berkembang termasuk Indonesia mulai menggeser orientasi kebijakannya dengan tidak lagi mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memprioritaskan peningkatan kesejahteraan. Perubahan cara pandang ini mendorong lahirnya konsep pembangunan holistik yang memaknai bahwa kemajuan bukan sekadar eskalasi angka ekonomi, tetapi perluasan kesempatan bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan yang lebih berkualitas (Indarti, 2017).

Paradigma baru ini sejalan dengan konsep pembangunan manusia yang diperkenalkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) pada tahun 1990 melalui *Human Development Report* (HDR). Esensi dari laporan tersebut menekankan bahwa determinan utama kemajuan sebuah bangsa terletak pada kualitas manusianya. Manusia tidak lagi ditempatkan sebagai alat atau “objek” untuk mencapai pertumbuhan, tetapi menjadi “subjek” yang berhak menikmati hasil dari pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, tujuan akhir dari pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan setiap individu untuk hidup

sehat, memiliki umur panjang, dan tetap produktif. Untuk menilai capaian pembangunan manusia secara objektif, UNDP mengembangkan alat ukur yang disebut dengan *Human Development Indeks* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (Badan Pusat Statistik, 2025).

Di Indonesia, Badan Pusat Statistik (BPS) menjadikan IPM sebagai salah satu parameter untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia baik secara nasional maupun daerah. Pengukuran IPM mengacu pada tiga dimensi utama, yaitu umur panjang dan hidup sehat (kesehatan), pengetahuan (pendidikan), serta standar hidup layak (ekonomi). Hasil perhitungan dari ketiga dimensi tersebut kemudian dirangkum menjadi satu angka indeks yang digunakan untuk mengevaluasi sekaligus membandingkan tingkat pembangunan manusia di berbagai wilayah.

Daerah yang mampu meningkatkan nilai IPM secara konsisten membuktikan bahwa strategi pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi telah berjalan dengan optimal. Peningkatan tersebut menjadi bukti bahwa program-program pembangunan yang dijalankan mampu memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2025). Realitas mengenai pentingnya kualitas sumber daya manusia tercermin secara nyata dalam data statistik nasional yang menunjukkan progres pembangunan manusia di Indonesia. Hal ini dibuktikan melalui nilai IPM yang terus mencatatkan kenaikan secara konsisten selama beberapa tahun terakhir.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 1. Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia,

Tahun 2016 - 2025

Berdasarkan gambar 1.1. Dalam rentang waktu 2016 hingga 2019, IPM Indonesia meningkat dari 70,18 menjadi 71,92 dengan rata-rata kenaikan sekitar 0,5 – 0,6 poin per tahun. Peningkatan ini berlangsung seiring dengan stabilnya kondisi perekonomian nasional. Stabilitas tersebut dibuktikan oleh laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mampu bertahan secara konsisten di angka 5%. Pada saat yang bersamaan, kondisi ini diperkuat dengan tingkat inflasi yang terjaga rendah di bawah 4% setiap tahunnya (Sekretariat Kabinet RI, 2019).

Memasuki tahun 2020 hingga 2021, laju peningkatan IPM sedikit melambat akibat pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, berbagai sektor mengalami tekanan ekstrem terutama pada sektor kesehatan, di mana lonjakan kasus terus terjadi setiap harinya diikuti dengan tingginya angka kematian, serta meningkatnya beban

layanan kesehatan di sejumlah wilayah (Dicky Irawan, 2022). Selain itu, pelayanan kesehatan umum juga turut terdampak, di mana terjadinya penurunan jumlah kunjungan ke Puskesmas hingga mencapai 40 – 50%, sehingga berisiko menghambat peningkatan derajat kesehatan dan harapan hidup masyarakat (Saputri & Berlianto, 2023). Sebagai respons terhadap kondisi tersebut, pemerintah melakukan berbagai langkah strategis, seperti melalui penyediaan rumah sakit darurat dan juga penambahan tenaga medis. Upaya ini berperan penting dalam menjaga stabilitas capaian pembangunan manusia, sehingga IPM Indonesia tetap meningkat meskipun laju pertumbuhannya sedikit melambat.

Selain tantangan pada sektor kesehatan, pandemi juga memaksa sistem pendidikan nasional untuk beradaptasi dengan cepat. Sektor pendidikan mengalami transformasi besar melalui kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang memengaruhi proses belajar mengajar serta membawa tantangan tersendiri bagi peserta didik maupun tenaga pengajar. Dalam menghadapi situasi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) melaksanakan berbagai kebijakan adaptif dengan mengintegrasikan penggunaan platform digital seperti Google Classroom, Zoom, dan Google Meet ke dalam proses belajar mengajar harian (Irwan et al., 2021). Upaya ini didukung dengan penyaluran bantuan kuota internet gratis secara rutin kepada guru dan siswa untuk mengurangi hambatan dalam mengikuti pembelajaran, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi dan infrastruktur digital. Meskipun efektivitasnya belum mencapai level maksimal jika dibandingkan dengan metode tatap muka, upaya-upaya yang telah dilakukan sangat

berperan dalam menjaga roda pendidikan tetap berputar, sehingga penurunan pada indikator pembangunan manusia selama masa pandemi dapat diminimalisir.

Dampak pandemi tidak hanya berhenti pada aspek kesehatan dan pendidikan saja, tetapi juga merambah ke sektor ekonomi yang turut mengalami guncangan hebat. Penetapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) memicu kontraksi pada perekonomian nasional yang membatasi ruang gerak dan aktivitas bisnis. Pembatasan ini menyebabkan penurunan drastis pada kegiatan produksi, terutama konsumsi rumah tangga yang merupakan penyumbang terbesar dalam perekonomian nasional. Sebagai konsekuensi dari lesunya pasar, banyak pelaku usaha terpaksa melakukan efisiensi operasional melalui pengurangan tenaga kerja, yang kemudian memicu lonjakan angka pengangguran dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai industri. Situasi ini pada akhirnya menggerus pendapatan dan daya beli publik, sehingga kemampuan finansial masyarakat untuk membiaya kebutuhan dasar seperti pangan, layanan medis, dan pendidikan menjadi sangat terbatas (Sina Garlans, 2020).

Setelah melewati fase krisis yang cukup berat pada rentang tahun 2020 – 2025, laju pertumbuhan IPM di Indonesia kembali menunjukkan penguatan sejalan dengan pulihnya kondisi ekonomi nasional. Aktivitas ekonomi yang mulai bergerak ke arah positif mencerminkan stabilitas yang jauh lebih terjaga dibandingkan pada saat masa pandemi. Secara perlahan, angka pengangguran pun mulai menurun dan tingkat kemiskinan berhasil dikendalikan secara lebih efektif. Di sisi lain, sektor pendidikan kembali menerapkan sistem pembelajaran tatap muka secara penuh, yang diiringi dengan optimalisasi layanan publik di berbagai sektor. Sinergi

perbaikan di berbagai aspek ini menciptakan kondisi yang lebih kondusif serta mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pertumbuhan IPM pada periode ini merupakan manifestasi dari proses rehabilitasi pembangunan yang berjalan secara bertahap (Noyo et al., 2024).

Peningkatan kualitas pembangunan manusia tidak sekadar ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini, tetapi juga untuk menjamin bahwa hasil dari pembangunan dapat terus dinikmati dan dipertahankan oleh generasi mendatang. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak diukur dari capaian jangka pendek saja, tetapi perlu memperhatikan kontinuitas manfaat yang dirasakan masyarakat. Keterkaitan antara pembangunan manusia dan prinsip keberlanjutan ini terefleksi secara jelas dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs).



Sumber: sdgs.bappenas.go.id

Gambar 1. 2. *Sustainable Development Goals*

Sebagai agenda pembangunan global yang memuat 17 tujuan yang saling terintegrasi, SDGs tidak hanya mendorong eskalasi kualitas hidup manusia, tetapi juga mengarahkan agar seluruh prosesnya berlangsung secara inklusif, merata, dan

berkelanjutan. Salah satu tujuan dalam SDGs yang beririsan langsung dengan peningkatan kualitas hidup manusia adalah Tujuan 3, yaitu Kehidupan Sehat dan Sejahtera (*Good Health and Well-Being*).

Tujuan ini berfokus pada upaya untuk menjamin kehidupan yang sehat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif pada seluruh kelompok usia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai strategi peningkatan derajat kesehatan, salah satuya melalui optimalisasi layanan kesehatan preventif seperti program imunisasi dasar. Imunisasi berfungsi untuk membentuk sistem kekebalan tubuh terhadap berbagai penyakit menular yang berpotensi menghambat fase tumbuh kembang anak.

Tingginya cakupan imunisasi terbukti dapat meminimalkan risiko kesakitan, kecacatan, bahkan mampu menekan angka mortalitas pada anak. Berdasarkan catatan dari World Health Organization (WHO) program imunisasi berhasil mencegah sekitar 3,5 – 5 juta kematian setiap tahunnya di seluruh dunia akibat berbagai penyakit seperti campak, difteri, tetanus, pertussis, dan influenza dengan sebagian besar penerima manfaat merupakan bayi dan anak-anak. Realitas ini menunjukkan bahwa imunisasi merupakan kebijakan kesehatan preventif yang paling efektif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sejak usia dini. Oleh karena itu, perkembangan cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia perlu diperhatikan untuk melihat sejauh mana upaya peningkatan kesehatan masyarakat telah dilakukan.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 1. 3. Persentase Anak Umur 12 – 23 Bulan yang Menerima Imunisasi Dasar Lengkap di Indonesia, Tahun 2016 – 2025 (Persen/Tahun)

Berdasarkan gambar 1.3, dapat terlihat bahwa cakupan imunisasi dasar lengkap di Indonesia selama periode 2016 – 2025 menunjukkan tren yang fluktuatif. Pada awal periode, yaitu tahun 2016 cakupan imunisasi mencapai 56,25%. Namun, capaian tersebut tidak berlangsung lama karena pada tahun 2017 terjadi penurunan yang cukup tajam. Penurunan ini terus berlanjut hingga tahun 2018, ketika cakupan imunisasi hanya mencapai 43,91%, yang merupakan capaian terendah selama periode pengamatan. Kondisi ini didominasi oleh maraknya persepsi negatif masyarakat terhadap higienitas dan keamaan produk vaksin. Salah satu pemicu utamanya adalah munculnya isu mengenai kandungan komponen non-halal pada beberapa jenis vaksin utama, seperti vaksin Campak-Rubella (MR).

Selain daripada itu, penyebaran informasi palsu (*hoax*) melalui media sosial terkait efek samping vaksinasi turut memperburuk keadaan, sehingga kepercayaan publik terhadap program imunisasi pada saat itu mengalami penurunan yang cukup drastis.

Pada tahun 2019, pemerintah melakukan berbagai upaya untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap program imunisasi. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi yang lebih masif serta penerbitan fatwa keagaaman yang bertujuan untuk memberikan kepastian mengenai aspek kehalalan vaksin. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah pada nyatanya memberikan dampak positif yang tercermin dari meningkatnya cakupan imunisasi sejak tahun 2019 hingga tahun 2025. Meskipun pada tahun 2020 seluruh negara dihadapkan pada pandemi COVID-19, cakupan imunisasi dasar lengkap masih tetap terjaga di angka 50,34%, yang mengindikasikan bahwa program imunisasi tetap dapat berjalan di tengah berbagai keterbatasan selama masa pandemi.

Setelah pandemi COVID-19 mulai mereda, cakupan imunisasi terus mengalami kenaikan dari 56,51% pada tahun 2021 menjadi 63,58% pada tahun 2023. Kenaikan ini berhasil dicapai salah satunya karena program Bulan Imunisasi Anak Nasional (BIAN) yang diinisiasi oleh Kementerian Kesehatan. Fokus utama program tersebut dikhususkan untuk menjangkau anak-anak yang belum melengkapi imunisasi dasar rutin selama masa pandemi. Memasuki tahun 2024 hingga 2025, cakupan imunisasi ini mampu bertahan stabil di kisaran 63,69% dan mencapai puncaknya di angka 63,88%. Capaian ini membuktikan bahwa sistem pelayanan kesehatan di Indonesia berhasil pulih dan mampu beradaptasi.

Selain itu, program imunisasi juga telah diintegrasikan dengan agenda penurunan angka stunting nasional, sehingga pemerintah perlu memastikan ketersediaan dan mengawasi distribusi vaksin agar dapat menjangkau ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.

Terjaganya kualitas kesehatan masyarakat tidak hanya bergantung pada perlindungan yang diberikan melalui imunisasi sejak dini, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan tempat masyarakat beraktivitas sehari-hari. Salah satu aspek yang berperan penting dalam mewujudkan lingkungan yang sehat adalah akses terhadap sanitasi layak. Terpenuhinya sarana sanitasi yang layak merupakan salah satu target utama dalam Tujuan 6 SDGs, yaitu Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*).

Sanitasi merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan terbebas dari pencemaran, dengan menitikberatkan pada pasokan air bersih, pengelolaan limbah yang memadai, serta penyediaan infrastruktur kebersihan. Menurut WHO, implementasi program air bersih, sanitasi, dan higiene (*wash*) secara efektif dapat menurunkan kejadian penyakit diare hingga sekitar 25 – 30%. Di sisi lain, WHO juga mencatat bahwa buruknya infrastruktur sanitasi menyebabkan sekitar 546 ribu kematian setiap tahunnya, yang sebagian besar disebabkan oleh penyakit diare. Fakta ini menunjukkan bahwa akses terhadap sanitasi yang layak tidak hanya berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan, tetapi juga berpengaruh secara langsung terhadap kondisi kesehatan masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 4. Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Sanitasi Layak di Indonesia, Tahun 2016 – 2025 (Persen/Tahun)

Berdasarkan gambar 1.4, Sejak tahun 2016, pemenuhan fasilitas sanitasi terus mengalami peningkatan dari angka 67,8% hingga mencapai puncaknya sebesar 85,37% pada tahun 2025. Tren positif ini merepresentasikan keberhasilan serta keberlanjutan intervensi pemerintah dalam membangun infrastruktur pemukiman dasar yang sehat selama satu dekade terakhir.

Selama periode 2016 – 2018, perluasan jangkauan sanitasi layak di Indonesia meningkat secara bertahap, yakni dari 67,8% menjadi 69,27%. Perkembangan ini didukung oleh pemerintah melalui berbagai program perubahan perilaku masyarakat seperti Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang diintensifkan secara luas di berbagai wilayah. Sementara itu, pada tahun 2019 terjadi kenaikan yang jauh lebih

tinggi, di mana cakupan sanitasi layak menjadi 77,39% atau meningkat sekitar 8% dari periode sebelumnya. Di sisi lain, pada tahun 2020 – 2025 cakupan rumah tangga terhadap sanitasi layak menunjukkan pertumbuhan yang tetap stabil, dengan laju kenaikan berada pada kisaran 1,2% hingga 1,8% per tahun.

Meningkatnya angka cakupan sanitasi layak ini didorong oleh perluasan pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, khususnya melalui skema proyek padat karya, penyediaan septik tank komunal, serta optimalisasi program Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS). Capaian tersebut turut diperkuat oleh integrasi dengan berbagai program bantuan sosial, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang mendorong percepatan perbaikan fasilitas kesehatan secara mandiri. Di sisi lain, peningkatan ini juga menunjukkan semakin menguatnya kesadaran kesadaran masyarakat terhadap pentingnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), terutama setelah masa pandemi COVID-19.

Membangun sumber daya manusia yang berkualitas tidak sekadar bertumpu pada pemeliharaan kondisi fisik yang sehat maupun lingkungan yang terbebas dari penyakit, tetapi juga memerlukan penguatan pada sektor pendidikan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas intelektual masyarakat. Kedua aspek tersebut perlu berjalan secara beriringin agar setiap individu memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap dinamika perubahan global.

Capaian pada sektor pendidikan dapat terlihat dari proporsi penduduk yang berhasil menuntaskan studi di perguruan tinggi, baik pada jenjang Diploma I (D1), Diploma II (D2), Diploma III (D3), Diploma IV (D4), Sarjana (S1), Magister (S2), maupun Doktor (S3). Banyaknya jumlah penduduk yang lulus perguruan tinggi

mencerminkan bahwa akses pendidikan kini terbuka jauh lebih luas, sekaligus menjadi bukti nyata dari meningkatnya kemampuan masyarakat. Hal ini sejalan dengan target Tujuan 4 SDGs, yaitu Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*), yang berkomitmen untuk menjamin sistem pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu serta memastikan setiap individu mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan potensi dirinya.

Individu dengan pendidikan tinggi cenderung mampu bekerja lebih produktif, sehingga mendapatkan penghasilan dan taraf hidup yang lebih baik dibandingkan dengan kelompok yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam jangka panjang, ketika lulusan perguruan tinggi ini terus bertambah, negara akan memiliki fondasi tenaga kerja yang kompeten untuk menciptakan inovasi dan pada akhirnya mendorong kemajuan ekonomi negara. Kondisi tersebut menjadikan pendidikan sebagai salah satu bentuk investasi yang sangat krusial bagi pembangunan manusia, mengingat manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh satu individu saja, tetapi juga berdampak luas pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.



Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)

Gambar 1. 5. Persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Berdasarkan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Indonesia, Tahun 2016 – 2025 (Persen/Tahun)

Berdasarkan gambar 1.5, persentase penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi di Indonesia selama satu dekade terakhir menunjukkan tren peningkatan yang positif, yaitu dari 7,92% pada tahun 2016 hingga mencapai angka tertinggi sebesar 11% pada tahun 2025. Pada periode 2016 – 2019, kenaikan berlangsung secara bertahap dari 7,92% menjadi 9,26%, yang mengindikasikan semakin meningkatnya proporsi lulusan SMA/SMK/MA yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Memasuki tahun 2020 – 2024, laju peningkatan angka kelulusan mengalami perlambatan dan cenderung stagnan di kisaran 10%. Fase stagnan ini mencerminkan lemahnya kondisi sosial-ekonomi nasional akibat pandemi COVID-19 yang memberikan dampak berkepanjangan. Kebijakan Pembatasan Sosial

Bersakala Besar (PSBB) pada saat itu memicu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan sumber pendapatan utama, sementara cadangan tabungan turut terkuras untuk memenuhi kebutuhan dasar. Di sisi lain, situasi ini diperburuk oleh meningkatnya beban biaya pendidikan yang semakin mahal ditengah kondisi kapasitas finansial masyarakat yang belum pulih sepenuhnya, sehingga sebagian mahasiswa terpaksa menunda studi atau bahkan berhenti melanjutkan studi akibat terkendala biaya.

Meskipun dihantam krisis ekonomi yang cukup mengguncang, penurunan angka kelulusan perguruan tinggi dapat ditekan melalui campur tangan pemerintah dalam bentuk program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang mulai diperkuat pada awal tahun 2020. Sebagai salah satu kebijakan di sektor pendidikan, KIP-K berfungsi sebagai instrumen perlindungan sosial dengan memberikan pembebasan biaya kuliah sekaligus memberikan uang saku bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Terlaksananya program KIP-K yang diiringi dengan proses pemulihan perekonomian pascapandemi turut mendorong peningkatan angka kelulusan perguruan tinggi hingga mencapai 11% pada tahun 2025.

Meskipun capaian pada tahun 2025 menjadi angka tertinggi yang berhasil dicapai, angka ini pada nyatanya masih tergolong rendah dan belum dikatakan ideal. Kondisi ini menjadi pengingat bahwa masalah struktural belum sepenuhnya teratasi di lapangan, khususnya bagi kelompok masyarakat yang masih terbentur masalah ekonomi dan beban biaya hidup mendasar.

Selain kendala finansial, faktor psikologis dan stigma masyarakat terhadap pendidikan tinggi juga turut menjadi hambatan dalam peningkatan angka

penyelesaian pendidikan tinggi. Di tengah ketidakpastian pasar tenaga kerja, muncul anggapan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, semakin sulit pula memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasinya. Persepsi tersebut pada akhirnya menurunkan motivasi sebagian masyarakat untuk melanjutkan pendidikan. Tidak hanya itu, masyarakat sering kali memiliki pandangan bahwa perguruan tinggi hanya sebagai sarana untuk memperoleh gelar saja, namun pada nyatanya pendidikan yang tinggi memiliki dampak jauh lebih luas, dimana seseorang dapat mengasah kemampuan berpikir kritis, memperluasjejaring sosial, serta membentuk kapasitas intelektual dan karakter yang diperlukan dalam menghadapi berbagai dinamika di masa depan.

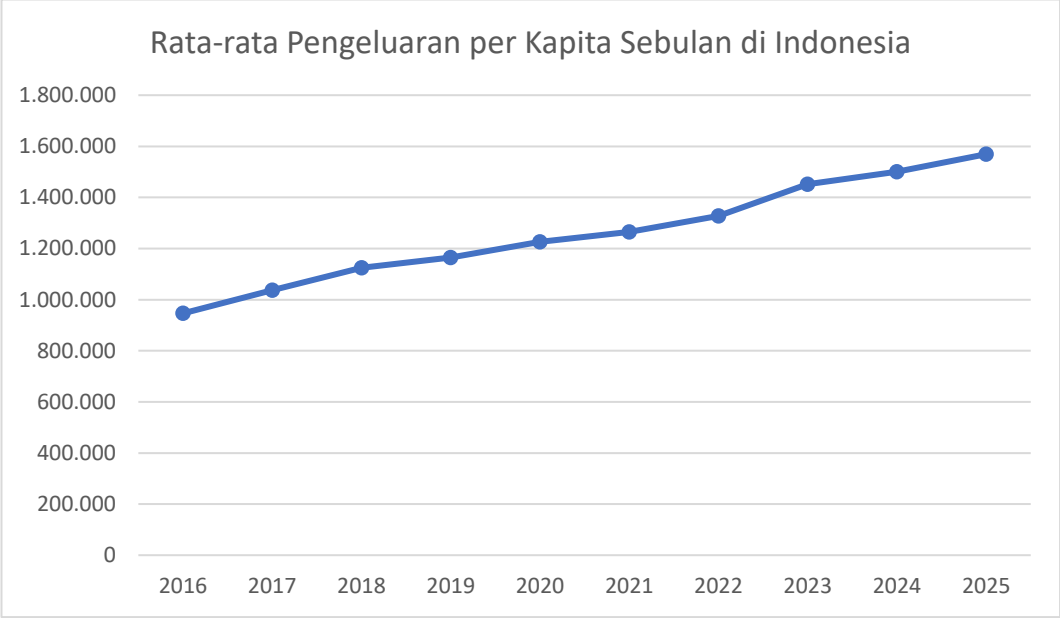
Pada dasarnya, preferensi masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tidak terlepas dari kemampuan ekonomi yang dimiliki. Salah satu indikator yang digunakan untuk menggambarkan kemampuan ekonomi tersebut adalah rata-rata pengeluaran per kapita, yang mencerminkan kapasitas rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik yang bersifat dasar maupun aspek penunjang lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan perspektif pembangunan berkelanjutan, kapasitas finansial masyarakat berhubungan erat dengan beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan. Pertama, Tujuan 1 Tanpa Kemiskinan (*No Poverty*). Kemiskinan tidak hanya ditandai oleh minimnya pendapatan yang diperoleh, tetapi juga ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Kondisi ekonomi yang stabil dan lebih baik memungkinkan masyarakat memiliki kapabilitas yang lebih besar untuk menjangkau kebutuhan esensial, seperti pangan, layanan kesehatan,

dan pendidikan, sehingga risiko terjerumus ke dalam garis kemiskinan dapat diminimalkan.

Kedua, Tujuan 2 Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*). Keterkaitan ini tercermin dari komponen pengeluaran per kapita untuk makanan, yang menunjukkan kemampuan individu dalam memperoleh makanan yang bergizi dan berkualitas. Kecukupan asupan gizi, terutama bagi balita dan ibu hamil berperan penting dalam menekan angka stunting serta mengoptimalkan proses tumbuh kembang anak yang menjadi fondasi bagi terbentuknya sumber daya manusia yang sehat dan produktif.

Ketiga, Tujuan 8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*). Hubungan ini didasari oleh fakta bahwa tingkat konsumsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh kesempatan kerja, produktivitas, dan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas ekonomi. Tersedianya pekerjaan yang layak memungkinkan masyarakat untuk mendapatkan penghasilan yang jauh lebih stabil, sehingga memiliki kapasitas yang lebih besar untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, tinggi rendahnya pengeluaran per kapita dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan oleh masyarakat.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 6. Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan di Indonesia, Tahun 2016 – 2025 (Rupiah/Orang/Bulan)

Berdasarkan gambar 1.6, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan periode 2016 – 2019 meningkat dari Rp946.258 menjadi Rp1.165.241. Peningkatan ini dipicu oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil, meningkatnya daya beli masyarakat, serta berkembangnya kelompok masyarakat menengah yang memacu aktivitas konsumsi, baik untuk kebutuhan makanan maupun nonmakanan.

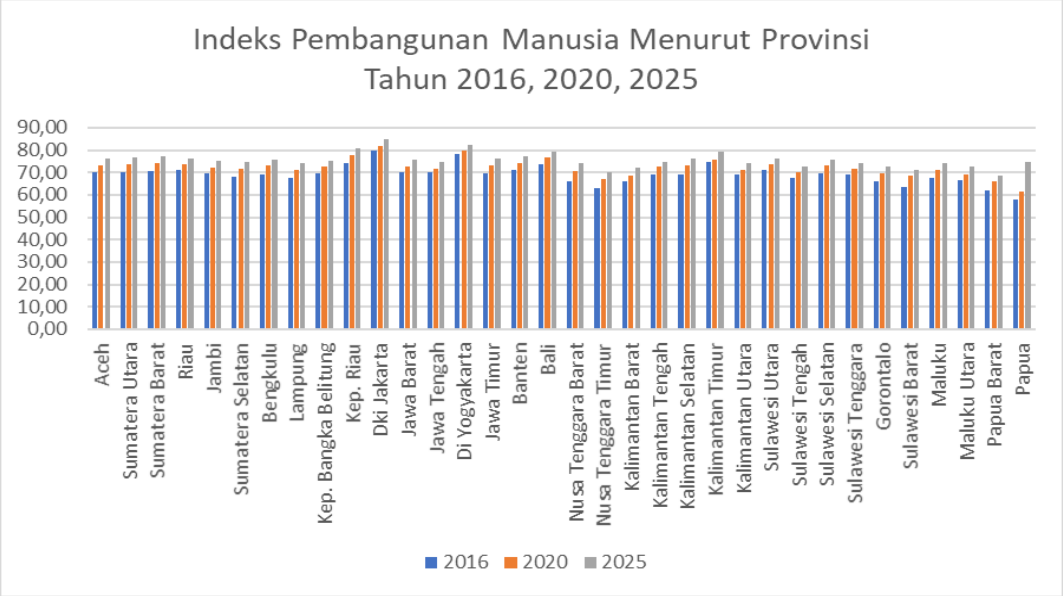
Pada periode 2020 – 2023, laju peningkatan rata-rata pengeluaran per kapita cenderung melambat dibandingkan periode sebelumnya akibat dari pandemi COVID-19 yang menekan aktivitas ekonomi nasional. Krisis kesehatan ini menyebabkan banyak usaha-usaha mengalami penurunan kinerja bahkan hingga gulung tikar, memicu terjadi PHK besar-besaran, serta menurunkan pendapatan sebagian masyarakat. Meskipun demikian, rata-rata pengeluaran per kapita pada

periode ini tetap meningkat dengan rata-rata kenaikan sekitar Rp75.000 per tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan konsumsi rumah tangga masih dapat dipertahankan di tengah tekanan ekonomi nasional. Tingkat konsumsi yang mampu bertahan ini ditopang oleh berbagai bantuan sosial dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan program Sembako yang membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar selama masa pandemi.

Sementara itu pada tahun 2023, rata-rata pengeluaran per kapita tumbuh cukup signifikan hingga mencapai Rp1.451.870 sebelum terus meningkat menjadi Rp1.569.088 pada tahun 2025. Perkembangan ini berjalan beriringan dengan proses pemulihan ekonomi pascakrisis pandemi yang ditandai oleh membaiknya penyerapan tenaga kerja, kembali menguatnya daya beli masyarakat, serta pulihnya produktivitas sektor rill. Seiring dengan membaiknya kondisi ekonomi, pengeluaran yang dilakukan oleh masyarakat tidak hanya dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan makanan, tetapi juga dialokasikan pada kebutuhan nonmakanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga rekreasi.

Meskipun nilai IPM Indonesia secara nasional dan seluruh faktor-faktornya terus mengalami peningkatan, capaian tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi pembangunan manusia yang merata di seluruh wilayah. Pada dasarnya, nilai IPM nasional merupakan hasil perhitungan rata-rata dari seluruh provinsi, sehingga kenaikan pada tingkat nasional tidak selalu berarti bahwa setiap provinsi mengalami perkembangan yang sama. Perbedaan capaian pembangunan ini tidak hanya disebabkan oleh faktor kesehatan, pendidikan, ataupun ekonomi, tetapi dapat juga disebabkan oleh beberapa faktor, seperti ketersediaan sumber daya,

karakteristik demografis antarwilayah, hingga distribusi penduduk dan etnisnya (Santoso & Anggraini, 2024).



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 7. Indeks Pembangunan Manusia Menurut Provinsi, Tahun 2016, 2020, 2025

Berdasarkan gambar 1.7. Seluruh provinsi di Indonesia mengalami peningkatan nilai IPM. Pada tahun 2016, nilai IPM antar provinsi masih menunjukkan disparitas yang cukup besar, dengan nilai terendah 58,05 dan tertinggi 79,60. Pada tahun 2020, rentang IPM tersebut meningkat menjadi 61,22 hingga 81,92, lalu kembali mengalami kenaikan pada tahun 2025 dengan kisaran nilai 68,48 hingga 85,05.

Provinsi dengan IPM tertinggi selama tahun 2016, 2020, dan 2025 diraih oleh DKI Jakarta karena didukung oleh peranannya sebagai pusat pemerintahan, bisnis, dan layanan publik dengan akses pendidikan dan kesehatan yang lebih lengkap dibandingkan dengan daerah lain. Selain itu, tingginya tingkat urbanisasi,

konsentrasi aktivitas ekonomi modern, serta ketersediaan lapangan kerja formal dengan pendapatan yang relatif tinggi turut meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Provinsi DI Yogyakarta juga secara konsisten mencatatkan nilai IPM yang tinggi, namun dengan karakteristik yang berbeda. Keunggulan Yogyakarta lebih banyak ditopang oleh kuatnya sektor pendidikan, yang tercermin dari tingginya tingkat partisipasi pendidikan serta keberadaan berbagai perguruan tinggi sehingga menciptakan lingkungan akademik dan budaya belajar yang kuat (Badan Perencanaan dan Reputasi Global UMY, 2023). Kondisi dari sektor pendidikan yang berkualitas ini mendorong terbentuknya sumber daya manusia yang handal, sehingga memberikan kontribusi besar terhadap tingginya capaian pembangunan manusia di wilayah tersebut (Delima et al., 2025).

Sebagian besar provinsi lainnya seperti Jawa Barat dan Jawa Timur menjadi daerah utama dalam aktivitas manufaktur, pertanian, dan sektor jasa yang mampu menciptakan lapangan kerja sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian Bali, yakni provinsi yang memiliki kekuatan utama pada sektor pariwisata, di mana aktivitas ekonomi banyak ditopang oleh industri jasa, perhotelan, dan restoran yang berkontribusi besar terhadap penyerapan tenaga kerja serta pendapatan rumah tangga. Sementara itu, Kalimantan Timur dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi berbasis sumber daya alam, khususnya mineral dan energi, dengan investasi besar pada sektor pertambangan dan migas yang memberikan kontribusi signfikan terhadap perekonomian daerah. Sedangkan Sumatera Utara berperan sebagai pusat perdagangan dan jasa sekaligus wilayah dengan perkebunan skala yang besar, terutama komoditas karet dan kelapa sawit.

Dibalik tingginya capaian IPM pada provinsi-provinsi tersebut, masih terdapat beberapa provinsi dengan capaian IPM yang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, salah satunya adalah provinsi Papua. Perbedaan ini terjadi karena Papua masih memiliki keterbatasan untuk mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, khususnya di wilayah terpencil dan sulit dijangkau secara geografis. Meskipun IPM Papua terus mengalami peningkatan hingga mencapai 74,69 pada tahun 2025, laju peningkatan tersebut masih menghadapi tantangan struktural yang berkaitan dengan keterbatasan infrastruktur dasar, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif tertinggal dibandingkan dengan wilayah lain (Badan Pusat Statistik, 2025). Selain daripada itu, karakteristik gerografis Papua yang didominasi dengan wilayah pegunungan dan daerah terpencar menyebabkan distribusi layanan publik menjadi kurang optimal, sehingga memengaruhi capaian indikator pembangunan manusia.

Perbedaan capaian IPM di setiap provinsi Indonesia mencerminkan bahwa pembangunan manusia masih belum merata, meskipun nilai IPM secara nasional terus mengalami peningkatan. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa variasi IPM antarprovinsi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor utama, tetapi juga oleh berbagai faktor kondisi sosial ekonomi lainnya yang turut berkontribusi dalam menjelaskan perbedaan tersebut. Salah satunya adalah tingkat kemiskinan yang dapat membatasi masyarakat dalam mengakses layanan dasar secara optimal, misalnya seperti pendidikan dan kesehatan, sehingga berpotensi memengaruhi capaian pembangunan manusia di setiap provinsi. Oleh karena itu, pengentasan kemiskinan menjadi salah satu target utama dalam Tujuan 1 SDGs yaitu Tanpa Kemiskinan (*No*

Poverty). Selain pengentasan kemiskinan, upaya mengurangi ketimpangan jua menjadi perhatian dalam SDGs pada Tujuan 10 yaitu Berkurangnya Kesenjangan (*Reduced Inequality*). Gini Ratio digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di masyarakat. Tingkat ketimpangan yang berbeda antarprovinsi dapat memengaruhi sejauh mana manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh masyarakat, sehingga ketimpangan pendapatan berpotensi memperkuat atau memperlemah pengaruh faktor lain yang mendukung peningkatan pembangunan manusia. Oleh karena itu, kondisi tersebut sejalan dengan tujuan SDGs yang menekankan betapa pentingnya pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan tidak meninggalkan kelompok ataupun wilayah tertentu (*no one left behind*).

Meskipun kajian mengenai IPM sudah banyak dilakukan, tetapi sebagian besar penelitian terdahulu masih berfokus untuk menguji variabel identitas yang merupakan komponen langsung pembentuk IPM. Misalnya, penelitian (Sakinah et al., 2022) di Sulawesi Tengah memfokuskan analisis pada pengaruh AHH dan pengeluaran perkapita terhadap IPM. Di sisi lain, penelitian serupa yang dilakukan (Rodiyah et al., 2025) di Jawa Tengah mengkaji hubungan RLS dan UHH terhadap IPM. Kedua studi ini cenderung mengonfirmasi hubungan matematis antar komponen penyusun IPM tanpa menggali faktor determinan eksternal yang lebih teknis. Selain itu, keterbatasan pada skala wilayah yang hanya berfokus pada satu provinsi dengan rentang waktu yang singkat menjadi celah yang perlu diperbaiki.

Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi IPM di Indonesia dalam perspektif SDGs, sehingga dapat dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan yang lebih tepat dan efektif dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia baik di tingkat provinsi ataupun nasional. Atas dasar permasalahan tersebut, penulis mengangkat judul **"ANALISIS DETERMINAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PADA TINGKAT PROVINSI DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS) TAHUN 2016 – 2025"**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Imunisasi Dasar, Akses Sanitasi Layak, Lulusan Perguruan Tinggi, dan rata-rata pengeluaran per kapita, di Indonesia selama periode 2016 – 2025?
2. Bagaimana pengaruh Imunisasi Dasar, Akses Sanitasi Layak, Lulusan Perguruan Tinggi, dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia selama periode 2016 – 2025 baik secara parsial ataupun simultan?
3. Bagaimana pengaruh Imunisasi Dasar, Akses Sanitasi Layak, Lulusan Perguruan Tinggi, dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia selama periode 2016 – 2025 dengan tingkat kemiskinan sebagai variabel kontrol baik secara parsial ataupun simultan?

4. Bagaimana Gini Ratio memoderasi pengaruh Imunisasi Dasar, Akses Sanitasi Layak, Lulusan Perguruan Tinggi, dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia selama periode 2016 – 2025 baik secara parsial ataupun simultan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan oleh penulis, adapun tujuan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Imunisasi Dasar, Akses Sanitasi Layak, Lulusan Perguruan Tinggi, dan rata-rata pengeluaran per kapita, di Indonesia selama periode 2016 – 2025.
2. Menganalisis pengaruh Imunisasi Dasar, Akses Sanitasi Layak, Lulusan Perguruan Tinggi, dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia selama periode 2016 – 2025 baik secara parsial ataupun simultan.
3. Menganalisis pengaruh Imunisasi Dasar, Akses Sanitasi Layak, Lulusan Perguruan Tinggi, dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia selama periode 2016 – 2025 dengan tingkat kemiskinan sebagai variabel kontrol baik secara parsial ataupun simultan.
4. Menganalisis bagaimana Gini Ratio memoderasi pengaruh Imunisasi Dasar, Akses Sanitasi Layak, Lulusan Perguruan Tinggi, dan rata-rata pengeluaran per kapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia selama periode 2016 – 2025 baik secara parsial ataupun simultan.

1.4. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam pengembangan kajian ekonomi pembangunan, khususnya terkait keberhasilan pembangunan manusia pada suatu wilayah yang tidak berorientasi pada aspek ekonomi saja, tetapi juga pada peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya sekaligus memperkaya literatur mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Bagi pemerintah

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan yang lebih terarah dan responsif terhadap ketimpangan yang terjadi di antarwilayah. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi IPM, pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat bersinergi untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan ekonomi masyarakat. Penelitian ini juga dapat digunakan untuk bahan evaluasi dalam mengoptimalkan pencapaian SDGs secara lebih terukur.

2. Bagi Masyarakat

   Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesenjangan antarwilayah, sehingga mendorong partisipasi yang lebih aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.

3. Bagi Akademisi

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam pengembangan studi mengenai pembangunan manusia, ekonomi regional, dan kebijakan publik. Selain itu, penelitian ini juga membuka ruang untuk pengembangan variabel serta model analisis yang lebih baik dan komprehensif dalam mengkaji pembangunan manusia di Indonesia secara berkelanjutan.

1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Masalah

Penelitian ini menggunakan data panel 34 provinsi di Indonesia selama periode 2016 hingga 2025. Penelitian difokuskan pada analisis faktor-faktor yang memengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam perspektif *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dari 17 tujuan SDGs, pembahasan dibatasi pada tujuan yang berkaitan dengan dimensi pembentuk IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak, meliputi Tujuan 1 (*No Poverty*), Tujuan 2 (*Zero Hunger*), Tujuan 3 (*Good Health and Well-Being*), Tujuan 4 (*Quality Education*), Tujuan 6 (*Clean Water and Sanitation*), Tujuan 8 (*Decent Work and Economic Growth*), dan Tujuan 10 (*Reduced Inequalities*).